

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERATURAN MENTERI
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 12 TAHUN
2020 TENTANG LOBSTER (*Panulirus spp.*), KEPITING (*Scylla spp.*), DAN
RAJUNGAN (*Portunus spp.*)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

**IRPAN ROMANDA
NPM : 1621020081**

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1442 H /2020 M**

**Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peraturan Menteri Kementerian Kelautan
Dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Lobster (*Panulirus Spp.*),
Kepiting (*Scylla Spp.*), Dan Rajungan (*Portunus Spp.*)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

IRPAN ROMANDA

NPM: 1621020081

Jurusan: Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Pembimbing I : Dr. H. Jayusman, M.Ag

Pembimbing II : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1442H/2020M**

ABSTRAK

Menteri kelautan dan perikanan di Indonesia sedikit banyaknya telah mengalami perubahan contohnya di masa priode menteri Susi Pudji Astuti dalam peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 56 tahun 2016 dengan menteri edhy prabowo dalam Peraturan Menteri kelautan dan perikanan nomor 12 Tahun 2020 yang dimana dalam kedua peraturan tersebut terdapat perbedaan yang menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat dan pengusaha. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 12 Tahun 2020 tentang pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan? Bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 12 Tahun 2020 tentang pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan?

Tujuan masalah dalam penelitian ini Untuk mengetahui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 12 Tahun 2020 tentang pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan

Dan Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 12 Tahun 2020 tentang pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif dimana sesuai dengan obyek kajian skripsi penelitian ini masuk dalam kategori *library research* yang bersifat deskriptif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer di peroleh dari peraturan menteri kelautan dan perikanan No 12 tahun 2020 tentang lobster kepiting dan jarungan sedangkan data sekunder di peroleh dari buku-buku, makalah, dan sumber lain yang berkaitan. Analisi data ini menggunakan analisis kualitatif yang dilakukan secara interaktif untuk memperoleh hasil analisa penelitian. Kesimpulan dari penelitian ini merevisi peraturan menteri kelautan dan perikanan No 56 tahun 2016 dan tinjauan *fiqh siyasah* terhadap peraturan menteri kelautan dan perikanan No 12 Tahun 2020 sudah sesuai dengan ketentuan *siyasah dusturiyah* yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Irpan romanda

NPM : 1621020081

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peraturan Menteri Kementerian Kelautan Dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), Dan Rajungan (*Portunus Spp.*)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun salinan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dalam *footnote* atau daftar pustaka apabila di lain waktu terdapat penyimpangan dalam karya ini maka tanggungjawab sepenuhnya ada di penyusun, demikian pernyataan dibuat agar dimaklumi

Bandar Lampung, 13 November 2020
Penulis

Materai

6000

Irpan romanda
NPM. 1621020081



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarampe, Bandar Lampung (0721)703260

PERSETUJUAN

**Judul : TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP
PERATURAN MENTERI KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 12
TAHUN 2020 TENTANG LOBSTER (*Panulirus
spp.*), KEPITING (*Scylla spp.*), DAN RAJUNGAN
(*Portunus spp.*)**

**Nama : Irpan romanda
NPM : 1621020081
Jursan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah**

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.**

Bandar Lampung, 01 Desember 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. Javusman, M.Ag.
NIP. 197411062000031002**

**Rohmat, S.Ag., M.H.I
NIP. 1974092020033121003**

Ketua Jurusan

**Frenki, M.S.I.
NIP. 198003152009011017**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP
PERATURAN MENTERI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG
LOBSTER (*Panulirus spp.*), KEPITING (*Scylla spp.*), DAN
RAJUNGAN (*Portunus spp.*).** Disusun oleh **Irpan romanda,**
NPM: **1621020081,** Jurusan Hukum Tata Negara, telah diujikan
dalam sidang munaqasah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan
Lampung pada Hari/Tanggal : Selasa, 01 Desember 2020

TIM MUNAQSAH

Ketua Sidang : Khoirudin, M.S.I

Penguji I : Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H

Penguji II : Dr. H. Jayusman, M.Ag.

Penguji III : Rohmat, S.Ag., M.H.I

Sekretaris : Dani Amran Hakim, S.H., M.H



MOTTO

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”

(Q.S Al-Mudatsir: 38)



PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang tak terhingga kepada :

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta, bapak ruswan dan ibuk melya wati alm, yang telah melahirkan, merawat dan membesarkanku penuh cinta kasih, dan pengorbanan yang selalu mendoakanku setiap waktu, memberiku semangat, menginspirasi, dan yang selalu mengharapkan anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang baik dan bermanfaat untuk semua orang. Terimakasih tak terhingga, semoga Allah memberikan kalian umur yang panjang sehingga aku bisa membahagiakan kalian kelak, dan semoga Allah selalu memberikan kalian kebahagiaan dunia dan akhirat.
Dan terimakasih juga kepada ibu sambung saya ibu evi meydasari yang telah member semangat dan dukungan dalam perkuliahan saya.
2. Saudara kandung saya Doni aprianda, Akbar irwanda dan keken merianda yang selalu menjadi penyemangat dalam segala langkah dan tujuan semoga kita semua bisa membahagiakan kedua orang tua kita.
3. Teman-temanku yang setia selalu memberikan dukungan.

RIWAYAT HIDUP

Irpan romanda, dilahirkan di Marang, kecamatan pesisir selatan, kabupaten pesisir barat pada tanggal 21 Januari 1998, anak pertama dari pasangan bpk Ruswan dan ibu melyawati alm. Pendidikan dimulai dari sekolah dasar negeri 01 marang kecamatan pesisir selatan kabupaten pesisir barat dan selesai pada tahun 2010, dilanjutkan dengan pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) negeri 01 ngambur, selesai pada tahun 2013, selanjutnya melanjutkan studi pada sekolah menengah atas (SMA) Negeri 01 pesisir selatan, selesai dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I Tahun Akademik 1438H/2016M.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan izin Allah SWT, segala puji syukur kupanjatkan atas segala nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan kepada saya, baik nikmat kesehatan, ilmu, semangat dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERATURAN MENTERI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG LOBSTER (*panulirus spp.*), KEPITING (*scylla spp.*), DAN RAJUNGAN (*portunus spp.*)” dapat diselesaikan. Serta sholawat dan salam disampaikan kepada

Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, sehabatnya dan pengikutnya. Atas bantuan semua pihak yang membantu baik bantuan materil dan immateril dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terima kasih sedalam-dalamnya, secara rinci ungkapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Bpk Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M. Ag selaku rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta
2. Bpk Dr. H. Jayusman, M.Ag Selaku pembimbing I yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing penulis serta memberikan arahan demi terselesainya skripsi ini..
3. Bpk H. Rohmat, S.Ag., Selaku pembimbing akademik II dalam penyusunan skripsi yang senantiasa tanggap luwes serta baik terhadap para mahasiswanya serta selalu meluangkan waktunya untuk membimbing penulis serta memberikan arahan demi terselesainya skripsi ini. .

4. Dosen-dosen Fakultas Syar'iah dan segenap civitas akademika UIN Raden Intan Lampung.
5. Kepala perpustakaan pusat dan fakultas serta segenap pengelola perpustakaan yang telah memberikan referensi nya.
6. Ketua Jurusan bpk Frankie, M.Si. beserta jajaran jurusan yang selalu memberi keringanan terhadap mahasiswanya.
7. Tak lupa juga untuk varnelis yang sedia selalu membantu dan memberikan arahnya.
8. Sahabat-sahabat anggota padepokan yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu serta saudara saya Imam Bochari yang telah memberikan dukungan dan doanya.
9. Seluruh anggota kelas HTN-A selalu kompak.
10. Teman-teman KKN kelompok 225.
11. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat tidak hanya bagi penulis tetapi juga bagi seluruh para pembaca. Amin.

Bandar Lampung, 13 November 2020
Penulis

Irpan romanda
1621020081

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan judul.....	1
B. Alasan memilih judul	2
C. Latar belakang masalah	3
D. Fokus penelitian	6
E. Rumusan masalah.....	6
F. Tujuan penelitian.....	7
G. Signifikasi penelitian.....	7
H. Metode penelitian.....	8

BAB II KAJIAN TEORI

A. Fiqh Siyasah	13
1. Pengertian Fiqh Siyasah	13
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	17
3. Siyasah Dusturiyah.....	19
4. Prinsip-Prinsip Siyasah Dusturiyah.....	25
5. Pengertian Taqin	26
6. Siklus perkembangan <i>Qanun</i>	30
7. Ragam Pandangan Ulama tentang Taqin al-Ahkam	34
8. Pendapat Ulama tentang Qanun al-Ahkam	38
9. Legislasi Hukum Islam dalam Hukum Nasional.....	40
B. Tinjauan Pustaka	44

BAB III PENYAJIAN DATA

A. Sejarah Peraturan Menteri KKP No 12 Tahun 2020	48
B. Peraturan Menteri KKP No 12 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan.....	49

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

- A. Perbedaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 12 Tahun 2020 tentang pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan Dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Larangan Penangkapan dan atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan Dari Wilayah Republik Indonesia 66
- B. Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peraturan Menteri KKP No 12 Tahun 2020 tentang pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan .. 71

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 77
- B. Rekomendasi..... 78

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi ini terlebih dahulu akan diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung didalamnya agar tidak terjadi kesalahan dan kerancuan perspektif dalam memahami skripsi ini. Skripsi ini berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peraturan Menteri Kementerian Kelautan Dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), Dan Rajungan (*Portunus Spp.*)” maka perlu ditemukan istilah atau kata-kata penting agar tidak menimbulkan kesalah pahaman dalam memberikan pengertian para pembaca sebagai berikut :

1. *Fiqh Siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.¹
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 12 Tahun 2020 tentang Lobster, kepiting, dan Rajungan. merupakan peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan ketertiban menjaga ekosistem laut.

Berdasarkan istilah tersebut dapat disimpulkan maksud dari judul keseluruhan yaitu “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peraturan Menteri

¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah-kontekstualisasi Doktrin Politik islam* (Indonesia: Pranadamedia Group, 2014), h.4

Kelautan dan Perikanan No. 12 Tahun 2020 Tentang Lobster, Kepiting dan Rajungan ”

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan dasar yang membuat penulis ingin memilih skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 12 tahun 2020 Tentang Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), dan Rajungan (*Portunus Spp.*)

1. Alasan Objektif

Lobster, Kepiting dan Rajungan merupakan bagian dari kekayaan alam yang ada di laut, maka sangat perlu adanya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya agar tidak terjadi kepunahan sumber daya alam. Oleh karena itu penulis merasa penting untuk meneliti lebih dalam tentang bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 12 tahun 2020 Tentang Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), Dan Rajungan (*Portunus Spp.*)

2. Alasan Subjektif

- a. Pembahasan ini diangkat dikarenakan belum ada yang membahas pembahasan ini didalam UIN Raden Intan Lampung, dan permasalahan ini sangat memungkinkan untuk dibahas dan diteliti karena tersedianya literatur yang menunjang masalah ini.
- b. Pembahasan ini sangat sesuai dengan keilmuan dan lingkungan penulis sehingga memudahkan penulis dalam melakukan pembahasan tentang permasalahan ini.

C. Latar Belakang Masalah

Sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pasal 18 ayat 1 yang berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan Undang-undang.”² Maka diharapkan agar potensi-potensi yang ada di daerah dapat dikembangkan sehingga menjadi suatu kebanggaan yang dapat memperkuat stabilitas otonomi daerah. Pengertian otonomi daerah secara luas adalah wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri mulai dari budaya, sosial, ekonomi dan ideologi yang sesuai dengan tradisi dan adat istiadat lingkungannya.

Pada alenia ke-IV Undang-Undang Dasar 1945, merupakan tujuan dari negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.³ Pengamalan pasal dalam konstitusi dan amanat dari pembukaan UUD 1945 ini akan dapat berlangsung secara sempurna jika terdapat kerja sama antar seluruh stake holder dalam kehidupan bernegara secara umum hingga kehidupan bermasyarakat dalam lingkungan terkecil secara khususnya.

² Undang-undang Dasar RI Tahun 1945 Tentang Pemerintah Daerah, bab VI pasal 18 ayat (1)

³ Undang-undang Dasar RI Tahun 1945, alenia ke IV

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar dan sebagian besar wilayahnya merupakan perairan. Dengan kondisi tersebut, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati dan potensi hasil laut yang besar salah satunya Lobster atau benih Lobster.

Menteri Kelautan dan Perikanan sebelumnya resmi mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 56 Tahun 2016 yang diterbitkan pendahulunya. Edhy pun menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 12 Tahun 2020 yang mengubah berbagai ketentuan, salah satunya membolehkan ekspor lobster dilakukan. Awalnya Pasal 7 ayat (1) Permen Kelautan dan Perikanan nomor 56 Tahun 2016 Susi terdapat ketentuan, “Setiap orang dilarang menjual benih lobster untuk budidaya.” Namun dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 12 Tahun 2020 ketentuan ini dihapus. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 12 Tahun 2020 lantas menambah ketentuan tentang benih lobster yang dijelaskan dengan diksi “Benih bening lobster”.

Ketentuan ekspor lobster diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 12 Tahun 2020. Salah satu syaratnya tercantum dalam huruf b yaitu, “eksportir harus melaksanakan kegiatan pembudidayaan lobster di dalam negeri.” Pada huruf d, ekspor benih lobster dilakukan melalui bandara yang ditetapkan oleh lembaga yang membidangi karantina ikan. Pada huruf f, ekspor dilakukan dengan memperhatikan stok ketersediaan di alam.⁴

⁴ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Pasal

Adapun ketentuan keberhasilan budidaya diatur dalam huruf c pasal 5. Isinya ekspor bisa dilakukan jika sudah panen secara berkelanjutan dan telah melepasliarkan 2 persen dari hasil pembudidayaan.⁵

Pasal 3 huruf a, permen Kelautan dan Perikanan No. 12 Tahun 2020 lantas juga mengatur penangkapan atau pengeluaran benih bening lobster termasuk budidayanya. Permen Kelautan dan Perikanan pun membuat ketentuan mengenai kuota dan lokasi yang ditetapkan oleh dirjen terkait dari hasil kajian Komnas KAJISKAN yang berbunyi “kuota dan lokasi penangkapan benih bening lobster (*Puerulus*) sesuai hasil kajian dari Komnas KAJISKAN yang ditetapkan oleh direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap” Lalu penangkapan benih bening lobster ini dilakukan oleh nelayan kecil yang terdaftar di lokasi sekaligus wajib menggunakan alat tangkap statis.⁶ Alat tangkap statis yang di maksud bersifat statis adalah perangkap yang umumnya berbentuk kurungan, berupa jebakan, dimana ikan/lobster akan mudah masuk tanpa adanya paksaan dan sulit untuk keluar. Contohnya jaring, bubu, sero, setnet, dll.⁷

Tidak hanya soal benih, meteri Kelautan dan Perikanan juga mengubah aturan penangkapan lobster yang bertelur. Pasal 2 huruf a Permen Kelautan dan Perikanan No. 56 Tahun 2016 sempat menyatakan penangkapan lobster dilakukan, ”tidak dalam kondisi bertelur.” Lalu pada huruf b diatur

⁵ *Ibid* pasal 3

⁶ *Ibid.*

⁷ Alat Tangkap Aktif, Pasif, dan Statis” (On-line), tersedia di <https://www.slideshare.net/mobile/nautika/diskusi-2-penangkapan> (26 Oktober 2020)

penangkapan lobster hanya untuk, “ukuran panjang karapas di atas 8 cm atau berat di atas 200 gram per ekor.”

Namun, di bawah kepemimpinan Edhy Prabowo ketentuan ini diubah. Pada pasal 2 huruf a dan b Permen Kelautan dan Perikanan No. 12 Tahun 2020 aturan ini direlaksasi. Menteri Kelautan dan Perikanan mengubah ketentuan “tidak dalam kondisi bertelur” menjadi “tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada Abdomen luar”. Lalu menteri Kelautan dan Perikanan juga menambahkan lobster sudah bisa ditangkap meski ukurannya di atas panjang 6 cm dan berat 150 gram.⁸

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas penulis bermaksud Meninjau bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan no. 12 tahun 2020 Tentang Penangkapan benih Lobster.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini terfokus pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 12 tahun 2020 Tentang Lobster (Panulirus Spp.), Kepiting (Scylla Spp.), Dan Rajungan (Portunus Spp.)

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana dalam pemikiran yuridis dan normatif tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 12 tahun 2020 Tentang Lobster

⁸ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Pasal 2

Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), Dan Rajungan (*Portunus Spp.*)?

2. Bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 12 tahun 2020 Tentang Tentang Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), Dan Rajungan (*Portunus Spp.*)?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 12 tahun 2020 Tentang Tentang Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), Dan Rajungan (*Portunus Spp.*)

Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 12 tahun 2020 Tentang Tentang Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), Dan Rajungan (*Portunus Spp.*)

G. Signifikasi Penelitian

Pentingnya penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan bagi masyarakat tentang bagaimana Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 12 tahun 2020 Tentang Tentang Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), Dan Rajungan (*Portunus Spp.*)

Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan agar dapat memberi kontribusi pada akademis khususnya hukum yang berkaitan dengan *fiqh siyasah* pada upaya pemerintah dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 12 tahun

2020 Tentang Tentang Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), Dan Rajungan (*Portunus Spp.*)

dan diharapkan dapat menjadi sambungan pemikiran bagi kemajuan ilmu hukum pada umumnya dan hukum tata Negara khususnya di UIN Raden Intan Lampung. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan dalam menggali nilai hukum yang hidup secara alami tumbuh di dalam lingkungan sosial, baik di dalam negeri maupun hubungan antar Negara yang menjalin kerja sama serta dapat memberikan manfaat teoritik yang luas.

H. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dari penafsiran fakta-fakta.⁹ Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang tatacara yang digunakan dalam mengadakan penelitian.

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam memecahkan masalah dalam penelitian ini yaitu Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.¹⁰ Sesuai dengan obyek kajian skripsi ini, maka jenis penelitian

⁹ Cholid Norobuko dan Ahmadi, *metode penelitian* (Jakarta: Pt. Bumi aksara,1997), h.1

¹⁰ Penelitian kualitatif disebut juga dengan penelitian naturalistic. Disebut kualitatif karena sifat data yang dikumpulkan bukan kuantitatif dan tidak menggunakan alat-alat pengukur statistik. Disebut naturalistic karena situasi lapangan penelitian bersifat wajar, tanpa dimanipulasi dan diatur oleh eksperimen dan tes. Lihat: Nasution, *Metode Penulisan Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1988), 18.

ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (library research), yaitu, pertama, dengan mencatat semua temuan mengenai motivasi konsumsi secara umum pada setiap pembahasan penelitian yang didapatkan dalam literatur-literatur dan sumber-sumber, dan atau penemuan terbaru mengenai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 12 Tahun 2020 tentang pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan. Setelah mencatat, kedua memadukan segala temuan, baik teori atau temuan baru, Ketiga, menganalisis segala temuan dari berbagai bacaan, berkaitan dengan kekurangan tiap sumber, kelebihan atau hubungan masing-masing tentang wacana yang dibahas di dalamnya. Terakhir adalah mengkritisi, memberikan gagasan kritis dalam hasil penelitian terhadap wacana-wacana sebelumnya dengan menghadirkan temuan baru.

2. Sifat Penelitian

Menurut Kaelan, dalam penelitian kepustakaan kadang memiliki deskriptif dan juga memiliki ciri historis.¹¹ Dikatakan historis karena banyak penelitian semacam ini memiliki dimensi sejarah, termasuk di dalamnya penelitian Agama, Penelitian kepustakaan ini bisa meliputi kritik pemikiran, penelitian sejarah agama, dan dapat pula penelitian tentang karya tertentu atau naskah tertentu. Oleh karenanya penelitian kepustakaan akan menghadapi sumber data berupa buku-buku yang jumlahnya sangat banyak sehingga memerlukan metode yang memadai. Untuk itu dalam penelitian kepustakaan, mengumpulkan buku harus secara

¹¹ Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner* (Yogyakarta: Paradigma, 2010), 134.

bertahap, sebab akan kesulitan apabila tidak demikian. Kaitannya dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 12 Tahun 2020 tentang pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah teknik pengumpulan data berupa riset, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, makalah, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan judul skripsi yang dimaksud.¹² Dalam data-data sekunder penulis menggunakan buku-buku yang terkait dengan penelitian ini yang penulis dapatkan dari perpustakaan atau toko-toko buku. Kemudian data tersebut di pergunakan untuk saling melengkapi, karena data yang di lapangan tidak akan sempurna apabila tidak di tunjang dengan data kepustakaan. Dengan menggunakan kedua sumber data tersebut maka data yang terhimpun dan memberikan validitas dan dapat di pertanggungjawab kan kebenarannya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, dalam hal ini penulis akan melakukan identifikasi wacana dari buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, web (internet), ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan skripsi ini untuk mencari hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya yang berkaitan dengan

¹² *Ibid.*, h. 58.

kajian tentang model motivasi konsumsi al-Ghazali dan Abraham Maslow.

Maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data-data yang ada baik melalui buku-buku, dokumen, majalah internet (web).
- b. Menganalisa data-data tersebut sehingga peneliti bisa menyimpulkan tentang masalah yang dikaji.

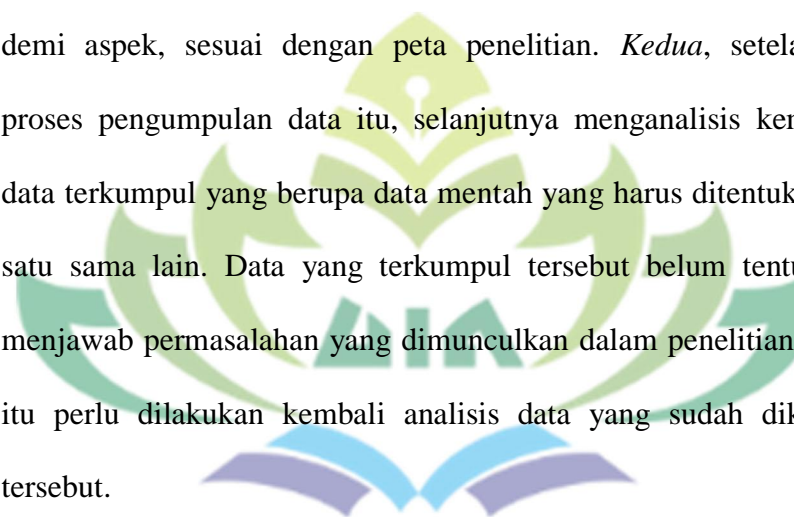
Pada hakikatnya tidak ada acuan khusus dalam mengumpulkan data pada metode ini, namun tidak dengan begitu saja data yang dikumpulkan dijadikan hasil penelitian, karena akal manusia memberikan bimbingan pekerjaan secara sistematis dan sesuai dengan objek kajiannya. Oleh karenanya perlu teknik tertentu agar hasil penelitian sifatnya sistematis dan objektif.

Dua instrument penelitian digunakan dalam pengumpulan data ini, *pertama*, pengumpulan data dalam bentuk verbal simbolik, yaitu mengumpulkan naskah-naskah yang belum dianalisis. Dalam pengumpulan data ini peneliti bisa menggunakan alat rekam, seperti fotocopy dan lain sebagainya.

Kedua, kartu data yang berfungsi untuk mencatat hasil data yang telah didapat untuk lebih memudahkan peneliti dalam mengklarifikasi data yang telah didapatkan di lapangan, selain itu pula kartu data memberikan solusi jika instrumen pertama sulit untuk dioperasikan, kartu data bisa digunakan sebagai pengganti dari instrument pertam, namun dengan konsekuensi lamanya waktu berada di lokasi sumber data.

5. Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisis data model Miles dan Huberman. Dalam model ini aktifitas analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus-menerus sampai dirasa cukup. Menurut Kaelan, ada dua tahap dalam teknik analisis data pada penelitian kepustakaan ini. *Pertama*, analisis pada saat pengumpulan data, ini ditujukan untuk lebih menangkap esensi atau inti dari fokus penelitian yang akan dilakukan melalui sumber-sumber yang dikumpulkan dan terkandung dalam rumusan verbal kebahasaan, proses ini dilakukan aspek demi aspek, sesuai dengan peta penelitian. *Kedua*, setelah dilakukan proses pengumpulan data itu, selanjutnya menganalisis kembali setelah data terkumpul yang berupa data mentah yang harus ditentukan hubungan satu sama lain. Data yang terkumpul tersebut belum tentu seluruhnya menjawab permasalahan yang dimunculkan dalam penelitian, oleh karena itu perlu dilakukan kembali analisis data yang sudah diklarifikasikan tersebut.



BAB II KAJIAN TEORI

A. Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Istilah fiqh merupakan taqrib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yakni fiqh dan siyasah. Secara etimologis, fiqh merupakan bentuk mashdar dari tashrifan kata faqiha-yafqahu-fiqhan yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu). Sedangkan secara terminologis, fiqh lebih populer didefinisikan sebagai berikut: Ilmu tentang hukum-hukum *syara* "yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci."¹³ Adapun *Al-siyasah* berasal dari kata yang berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Secara terminologis, sebagaimana dikemukakan Ahmad Fathi Bahatsi, *Siyasah* adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan *syara*". Definisi lain ialah Ibn Qayyim dalam Ibn „Aqil menyatakan: "*Siyasah* adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkan dan bahkan Allah tidak menentukannya".¹⁴ Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, *fiqh siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada

¹³ Wahbah az-Zuhayli. *Ushul al-Fiqh al-islami*, (Damaskus: Daral-Fikr, 2010), h. 18.

¹⁴ H. A. Djazuli. *Fiqh Siyâsah*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 28.

khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernaafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.¹⁵

Objek kajian *fiqh siyasah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan.¹⁶ Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian *siyasah* memusatkan perhatian pada aspek pengaturan. Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M. Hasbi Ash Shiddieqy: “Objek kajian *siyasah* adalah pekerjaan-pekerjaan *mukallaf* dan urusan-urusan mereka dari jurusan *penadbiran*-nya, dengan mengingat persesuaian *penadbiran* itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan *syariah* „amah yang tetap”.¹⁷ Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abul Wahhab Khallaf: “Objek pembahasan ilmu *siyasah* adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi

¹⁵ H. A. Djazuli. *Fiqh Siyâsah*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 30.

¹⁶ Ibid. h. 33.

¹⁷ Wahbah al-Zuhayli. *Ushul al-Fiqh al-islami*, (Damaskus: Daral-Fikr, 2010), h. 25.

kebutuhannya”.¹⁸ Secara garis besar maka, objeknya menjadi peraturan dan perundang-undangan, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara.¹⁹ Suyuti Pulungan, menampilkan beberapa pendapat ulama tentang obyek kajian *fiqh siyasah* yang berbeda-beda, lalu menyimpulkan bahwa objek kajiannya adalah : 1. Peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan umat. 2. Pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan. 3. Mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara.²⁰ Metode yang digunakan dalam membahas *fiqh siyasah* tidak berbeda dengan metode yang digunakan dalam membahas *fiqh* lain, dalam *fiqh siyasah* juga menggunakan ilmu *ushul fiqh* dan *qowaid fiqh*. Dibandingkan dengan fiqih-fiqih yang disebutkan, penggunaan metode ini dalam *fiqh siyasah* terasa lebih penting. Alasannya, masalah *siyasah* tidak diatur secara terperinci oleh syari’at Al-Qur’an dan Al-Hadits.²¹ Secara umum, dalam *fiqh siyasah*, digunakan metode-metode seperti :

- a. *Al-Qiyas*. *Al-Qiyas* dalam *fiqh siyasah*, digunakan untuk mencari ilat hukum. Dengan penggunaan *Al-Qiyas*, hukum dari sesuatu masalah, dapat diterapkan pada masalah yang lain pada masa dan tempat yang berbeda, jika masalah-masalah yang disebutkan terakhir mempunyai ilat

¹⁸ Pulungan J Suyuti. *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Rajawali, 2012), h. 45.

¹⁹ *Ibid.* h. 47.

²⁰ *ibid.* h. 48

²¹ H. A. Djazuli. *Fiqh Siyâsah*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 30.

hukum yang sama dengan masalah yang disebutkan pertama. Penggunaan *al-Qiyas* sangat bermanfaat, terutama dalam memecahkan masalah-masalah baru. Akan tetapi kenyataannya, tidak semua masalah baru dapat dipecahkan dengan penggunaan *Al-Qiyas*. Dalam keadaan demikian, digunakan metode lainnya.²²

b. *Al-Mashalah al-Mursalah*. Pada umumnya *Al-Mashalah al-Mursalah* digunakan dalam mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan yang tidak diatur oleh syari'at Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena itu, penarapan *al-Mashlahah al-Mursalaah* harus didasarkan pada hasil penelitian yang cermat dan akurat juga dalam kepustakaan fiqih, dikenal dengan istilah *istqra'*. Tanpa penelitian seperti itu, penggunaan *al-Mashlahah al-Mursalah* tidak akan menimbulkan kemaslahatan, tetapi justru sebaliknya mengakibatkan kemafsadatan.

c. *Sadd al-Dzariah dan Fath az-Zari'ah* Dalam *fiqh siyasah sad az-Zariah* digunakan sebagai upaya pengendalian masyarakat untuk menghindari kemafsadzataan. Dan *Fath az-Zari'ah* digunakan sebagai upaya perekayasaan masyarakat untuk mencapai kemaslahatan.²³

d. *Al-'Adah* Metode ketiga yang banyak digunakan dalam *fiqh siyasah* adalah *al-'adah*. *Adah* ini ada dua macam, yaitu: *al-adah ash shohihah* dan *al-.,addah al-fasidah*. *Al-'adah ash sohihah* yaitu adat yang tidak

²² Abdul Muin Salim. *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 50.

²³ *Ibid.* h. 51.

menyalahi *Syara'*, sedangkan *al-ada' al-fasida* yaitu adat yang bertentangan dengan *syara'*.

- e. *Al-Istihsan* Sering diartikan perubahan dalil yang dipakai seorang mujtahid. Dalam hubunga itu dalil yang satu ke dalil yang lain yang menurutnya lebih kuat. Menurut 'Ibn 'Arabiy: "melaksanakan dalil yang kuat diantara dua dalil".
- f. Kaidah-kaidah *Kulliyah Fiqhiyah*. Kaidah ini sebagai teori ulama banyak digunakan untuk melihat ketepatan pelaksanaan *fiqh siyasah*. Kaidah-kaidah ini bersifat umum. Oleh karena itu dalam penggunaannya perlu memperhatikan kekecualian-kekecualian dan syarat-syarat tertentu.

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Ruang lingkup *fiqh siyasah* dibagi menjadi 3 bagian :

- a. *Fiqh Siyasah Dusturiyah* yaitu, keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat.²⁴
- b. *Fiqh Siyasah Ma'liyah* yaitu, hak dan kewajiban kepala negara untuk mengatur dan mengurus keungan negara guna kepentingan warga negaranya serta kemaslahatan umat.²⁵
- c. *Fiqh Siyasah Dauliyah* yaitu, pengaturan masalah kenegaraan yang bersifat luar negeri, serta kedaulatan negara. Hal ini sangat penting guna kedaulatan negara untuk pengakuan dari negara lain.²⁶

²⁴ Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017), h. 41.

²⁵ *Ibid.* h. 43.

²⁶ Rizal. *Pengantar Fiqh Pengantar Ilmu Politik*. (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 60.

Sehingga dalam pembahasan skripsi ini *Fiqh Siyasah Dusturiyah* yang akan menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini. *Fiqh Siyasah Dusturiyah* yaitu, keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat.²⁷ Oleh karena itu objek kajian *Fiqh Siyasah Dusturiyah* meliputi peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur'an, hadist nabi, kebijakan pemimpin, ijtihad ulama, dan adat kebiasaan suatu negara baik tertulis ataupun tidak tertulis yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dengan prinsip-prinsip agama yang merupakan perwujudan realisasi kemaslahatan rakyat demi memenuhi kebutuhannya.²⁸ Ilmu *Siyāsah Dusturiyāh* mulai mendapat sorotan dan minat dari masyarakat yang ingin mengetahui calon pemimpin seperti apa yang diinginkan dalam Alquran. Banyak calon pemimpin Islam sering menjelaskan bahwa mereka ingin menjalankan amanah menurut apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi yang terjadi malah sebaliknya, ini dikarenakan kurangnya pemahaman seorang calon pemimpin tentang apa yang dijelaskan Nabi Muhammad SAW dan bagaimana sistem pemerintahan dalam Alquran.²⁹ *Fiqh Siyasah Dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik

²⁷ *Ibid.* h. 45.

²⁸ *Ibid.* h. 62.

²⁹ Saebani Beni, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik*. (Bandung: Pustaka Setia. 2013), h.

ayat-ayat Al-Quran maupun hadis.³⁰ Antara ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang perintah agar berlaku adil dan menetapkan hukum adalah QS.An-Nisa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Maksud dari ayat di atas adalah sifat adil penguasa terhadap rakyat di bidang apapun dengan tidak membedakan antara satu kelompok dengan kelompok lain di dalam pelaksanaan hukum, sekalipun terhadap keluarga bahkan anak sendiri.³¹

3. Siyasah Dusturiyah

a. Pengertian Siyasah Dusturiyah

³⁰ Ibid. h. 23.

³¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hikmah Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 69

Kata fiqh berasal dari *faqaha-yafquhu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian fiqh adalah “paham yang mendalam”.³² Fiqh secara etimologis adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.³³ Secara terminologis fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *fashil* (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-qur'an dan sunnah).

Kata “*siyasah*” yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk menakup sesuatu. Siyasah menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Siyasah secara terminologis dalam lisan al-Arab, siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.

Dusturiyah berasal dari bahasa Persia yang berarti dusturi. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam

³² Muammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), h. 2.

³³ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta : RajaGrafindo, 1994), h. 21

bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota pendekatan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa Arab, kata dusturiyah berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, dusturiyah berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).³⁴

Dapat disimpulkan bahwa siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas perundang-undangan Negara dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, (Undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi, (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.

Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.³⁵

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan

³⁴ <http://rangerwhite09-artikel.blogspot.co.id/2010/04/kajian-fiqh-siyasah-tentangkonsep.html>, (05 Januari 2019).

³⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh...*h. 27

persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy yang berisikan ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadist maqashid al-syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadikan di dalam mengubah masyarakat dan menjadikannya sebagai aturan dasar dalam menetapkan hukum. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama yakni yang disebut dengan fiqh. Apabila dipahami penggunaan kata dustur sama dengan constitution dalam bahasa Inggris atau Undang-undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata dasar dalam bahasa Indonesia tidaklah mustahil berasal dari kata dusturiyah. Sedangkan penggunaan istilah fiqh Dusturiyyah, merupakan nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dan kenegaraan dalam arti luas, karena di dalam dusturiyah itu lah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan didalam pemerintahan suatu Negara, dusturiyah dalam suatu Negara sudah tentu peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dusturiyah tersebut. Dusturiyah dalam konteks keindonesiaan adalah undang-undang dasar yang merupakan acuan dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.³⁶

³⁶ Dr. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta:

Sumber fiqh *dusturiyah* pertama adalah Al-Qur'an yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan semangat ajaran Al-Qur'an. Kemudian kedua adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rosulullah SAW didalam menerapkan hukum di negeri Arab. Ketiga, adalah kebijakan-kebijakan khulafa ar-rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan meskipun mereka mempunyai perbedaan dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawa masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat. Keempat, adalah hasil para ijtihad ulama', didalam masalah fiqh *dusturiyah* hasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fiqh *dusturiyah*. Dalam mencari mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. Sumber kelima adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-qur'an dan hadis. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering di istilahkan dengan konvensi. Adapula dari adat al'qur'an dan hadis melainkan melihat dari kemaslahatan umat manusia. Hal itu tidaklah menyangkut agama, suku dan budaya.³⁷

Fiqh siyasah *dusturiyah* merupakan sama halnya dengan undang-undang dasar suatu Negara yang dijadikan rujukan aturan

Prenadamedia Group, 2014, h.177.

³⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh...* h. 27

perundang-undangan dalam menegakkan hukum. Menurut Abdul Khallaf Wahab dalam bukunya yang berjudul *as-siyasah al-syariah*, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membedakan stratifikasi social, kekayaan, pendidikan, dan agama. Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaedah perundang-undangan disuatu Negara untuk diterapkan, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundang-undangan, maupun sumber penafsirannya.

Fiqh siyasah dusturiyah dapat terbagi kepada:

- a. Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk dalam persoalan ahlul halli wa aqdi, persoalan perwakilan rakyat, hubungan muslimin dan non muslimin didalam satu Negara, seperti Undang-undang Dasar, Undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.
- b. Bidang siyasah *tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wizarah, waliy al-ahadi dan lain-lain.
- c. Bidang *siyasah qadlaiyyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
- d. Bidang siyasah idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.³⁸

³⁸ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2009, h. 48

Menurul Al Mawardi, ruang lingkup kajian fiqh siyasah mencakup:

- a. Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*).
- b. Ekonomi dan militer (*siyasah maliyah*)
- c. Peradilan (*siyasah qadha'iyah*)
- d. Hukum perang (*siyasah harbiah*).
- e. Administrasi negara (*siyasah idariyah*).³⁹

Fikih siyāsah pada bidang *siyasah idariyah*, yakni bidang yang mengurus tentang administrasi negara. Kata idāriyah merupakan maṣḍar (*infinitif*) dari kata *idarahasy-syay'a yudiruhu idarah*, yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu. Adapun pengertian idariyah secara istilah, terdapat banyak pakar yang mendefinisikannya. Namun dari sekian banyak definisi, baik administrasi dalam arti luas dan sempit, maupun administrasi dalam arti institusional, fungsi dan proses, semuanya bermuara pada satu pengertian.⁴⁰

4. Prinsip – prinsip Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiah yang merupakan kontribusi islam dalam system politik mempunyai prinsip penting mengenai pembentukan peraturan perundang- undang. Antara lain mengacu pada prinsip nash dan prinsip *jalb al-mashalih wa dar al-mafasid*, prinsip nash yang ditegaskan oleh

³⁹ Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah, 2006), 4; Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h 13.

⁴⁰ Al-Qabathi dan Muhammad Abduh, *Ushul al-Idarah asy-Syar'iyah*, (Bayt ats-Tsaqafah, cetakan I, 2003), h. 7.

munawir sjadzali dalam karyanya “islam dan tatanegara; ajaran, sejarah dan pemikiran”. Mencakup :

- a. Prinsip kedudukan manusia dimuka bumi
- b. Musyawarah
- c. Ketaatan pada pemimpin
- d. Keadilan
- e. Persamaan, dan
- f. Hubungan baik antar ummat beragama.

Sedangkan prinsip jabl al- mashalih wa dar al- mafasid menurut Muhammad iqbal dalam karyanya “fiqih siyasah:kontekstulisasi doktrin politik islam”, tentu perlunya mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial kemasyarakatan, agar hasil regulasi yang di undangkan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan.⁴¹

5. Pengertian Taqin

Kata taqnîn merupakan bentuk masdar dari qannana, yang berarti membentuk undang-undang. Ada yang berpendapat kata ini merupakan serapan dari Bahasa Romawi, canon. Namun ada juga yang berpendapat, kata ini berasal dari Bahasa Persia. Seakar dengan taqnin adalah kata qanun yang berarti ukuran segala sesuatu, dan juga berarti jalan atau cara (thariqah).⁴² Qanun al-Ahkamberarti mengumpulkan hukum dan kaidah penetapan hukum (tasyri`) yang berkaitan dengan masalah

⁴¹http://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://kilaskalbar.com/opini/26/06/2018/siyasah-dusturiyah-dalam-peraturan-undangan-di-indonesia/amp/&ved=2ahUKEwixs_2WuJHuAhXugtGFHfSLAS0QFjAlegQIBxAB&usg=AOvVAW0OUrXfq1wuvMEoqyuSuS3r&cf=1

⁴² Ibrahim Anis, *Al-Mu`jam al-Wasith*, Juz II, (Beirut: Dar al-Ilmiyah, 1987), h.763

hubungan sosial, menyusunnya secara sistematis, serta mengungkapkannya dengan kalimat-kalimat yang tegas, ringkas, dan jelas dalam bentuk bab, pasal, dan atau ayat yang memiliki nomor secara berurutan, kemudian menetapkan sebagai undang-undang atau peraturan, lantas disahkan oleh pemerintah, sehingga wajib bagi para penegak hukum menerapkannya di tengah masyarakat.⁴³ Menurut Sobhi Mahmasani kata Qanun berasal dari bahasa Yunani, masuk menjadi bahasa Arab melalui bahasa Suryani yang berarti alat pengukur atau kaidah. di Eropa, istilah kanun atau canon dipakai untuk menunjuk hukum gereja yang disebut pula canonic.⁴⁴

Cononici yang disahkan oleh Paus Gregorus XIII tahun 1580, kemudian codex iuris coninci oleh Paus Benediktus XV tahun 1919. Hukum kanonik ini terdiri atas injil, fatwa-fatwa dari pemimpin gereja, keputusan dari sidang-sidang gereja dan keputusan dan perintah dari paus.⁴⁵

Oleh intelektual muslim di masa lalu, istilah kanun digunakan untuk menyebut himpunan pengetahuan yang bersifat sains seperti buku yang ditulis oleh Ibnu Sina dalam bidang kedokteran yang berjudul Qanun fi al-Tibb, Qanun al-Mas'udi yakni himpunan pengetahuan tentang astronomi yang dihimpun untuk Sultan al-Mas'ud (sultan Ghaznawiyah) yang ditulis oleh al-Biruni. Menurut para orientalis barat seperti Goldziher, Von Kremer, dan Scheldon Amos, bahwasannya syari'at yang dibawa Muhammad saw

⁴³ Mushtafa aL-Zarqa, *Al-Madkhâl al-Fiqh al-`Am*, Juz II, (Beirut: Dar al-Qalam, 1418 H), h. 313

⁴⁴ Sobhi Mahmasani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: al-Ma'arif, 1976), h. 27.

⁴⁵ J. van Kan dan J.H. Beekhuis, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Pustaka Sarjana, t.t.), h. 143-144.

adalah seperti halnya hukum-hukum (Canonic) Romawi yang diadopsi kepada hukum-hukum Arab. Ia mengajukan argumen bahwa pada saat itu sebelum Muhammad menjadi Rasul ia telah mengetahui tentang hukum-hukum Romawi yang terdapat di negeri-negeri yang menjadi kekuasaan imperium Romawi.⁴⁶

Akan tetapi para Sarjana Muslim menolak secara tegas pendapat yang dikemukakan oleh para orientalis tersebut dengan mengajukan argumen bahwa Muhammad dilahirkan di Mekah yang notabene bukan daerah kekuasaan Romawi dan Muhammad tidak pernah keluar dari Mekah sebelum menjadi Rasul melainkan hanya dua kali saja yaitu ketika rasul masih berusia 12 tahun bahkan ada yang berpendapat masih berusia 7 tahun ketika beliau ikut bersama pamanya Abu Thalib ke Syam. Adapun yang kedua adalah ketika beliau berumur 25 tahun untuk berniaga menjalankan bisnis Khadijah bersama pengawalnya yakni Maisarah dan telah diketahui bahwa sang Rasul tidak mempunyai kemampuan membaca dan menulis. Selain berdasarkan pada sejarah para sarjana muslim juga mengajukan argumen bahwa mustahil bercampurnya syari'at Islam dengan Qanun Romawi karena syari'at Islam berdasarkan kepada wahyu.⁴⁷

Dalam konteks sekarang, menurut Mahmasani istilah qanun memiliki tiga arti yaitu: pertama, pengertian yang sifatnya umum yaitu kumpulan aturan hukum (codex) seperti qanun pidana Utsmani. Kedua, berarti syariat atau hukum, dan ketiga, dipakai secara khusus untuk kaidah-kaidah atau

⁴⁶Abdul Karim Zaidan, *Al-Madkhal li al-Darasah al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Beirut: Resalah Publisher, 1969), h. 63.

⁴⁷ Ibid, h. 63.

aturan yang tergolong dalam hukum mu'amalat umum yang mempunyai kekuatan hukum, yakni undang-undang, seperti dewan legislatif membuat qanun larangan menimbun barang.⁴⁸ Sebagai perbandingan, dalam ilmu hukum dikenal istilah hukum dan undang-undang. Dalam ilmu hukum, hukum yaitu himpunan petunjukpetunjuk hidup (perintah maupun larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan oleh karena itu seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, dan pelanggaran atas peraturan tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu.⁴⁹ Adapun yang disebut pengertian undang-undang secara umum diartikan peraturan yang dibuat oleh negara.

Undang-undang memiliki ciri yaitu keputusan tertulis, dibuat oleh pejabat yang berwenang, berisi tentang aturan tingkah laku, dan mengikat secara umum.⁵⁰

Dalam literatur hukum Islam pada saat sekarang, istilah dan bentuk dari hukum Islam mengalami perkembangan, ada yang disebut fikih yakni ijtihad ulama yang tertera dalam kitab-kitab fikih, fatwa yakni pendapat atau ketetapan ulama atau dewan ulama tentang suatu hukum, keputusan-keputusan hakim (qadha), dan qanun.⁵¹ Qanun dalam kontes sekarang dipandang sebagai formalisasi hukum Islam, yakni aturan syara' yang dikodifikasi oleh pemerintah yang bersifat mengikat dan berlaku secara umum. Lahirnya Qanun dalam era moderen ini sebagai konsekwensi dari

⁴⁸ Sobhi Mahmasani, *op.cit.*, h. 28.

⁴⁹ E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar, 1957), h. 9.

⁵⁰ Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1998), h. 10

⁵¹ Jaih Mubarak, *Hukum Islam*, (Bandung: Benang Merah Press, 2006), h. 1.

sistem hukum yang berkembang terutama oleh karena pengaruh sistem hukum Eropa. Atas hal ini, sebagian ulama menganggap formalisasi hukum Islam adalah sesuatu yang penting sebagai panduan putusan hukum para hakim dalam suatu masalah yang sama pada lembaga peradilan yang berbeda-beda. Sementara sebagian yang lain tidak sependapat dengan Qanun al-Ahkam.

dengan argumentasi tersendiri dari mereka. Perbedaan pandangan ini kadang menghasilkan pertentangan yang sengit antara kedua kubu. Sebagai akademisi, patut untuk melakukan analisa atas argumentasi dua kutub pemikiran yang berbeda ini. Maka, dalam tulisan ini akan dipaparkan sekilas tentang sejarah Qanun al-Ahkam, pandangan para ulama tentang Qanun al-Ahkam dan analisa pendapat-pendapat tersebut.

6. Siklus perkembangan *Qanun*

Apabila *Qanun* dimaknai secara luas dan salah satu maknanya diartikan sebagai tasyri' (pembentukan hukum), maka *qanun* dapat dilacak keberadaannya sejak masa nabi SAW. Akan tetapi apabila *qanun* diartikan sebagai konsep hukum sekarang, yakni hukum tertulis yang bersifat mengikat, temporer dan memiliki sanksi, maka *qanun* dalam konsep tersebut tidaklah dapat diterapkan kepada masa Nabi saw pernah ada piagam madinah atau shahifah Madinah yang berisi tentang hak dan kewajiban warga Madinah, baik muslim maupun non muslim untuk menjaga

kedaulatan Madinah. Oleh ahli hukum, dikatakan bahwa piagam Madinah merupakan konstitusi negara yang tertulis.⁵²

Begitu juga di masa sahabat, ide tentang qanun belum ditempuh. Ide yang baru muncul adalah pemushafan Al-Qur'an yang dilakukan oleh Abu Bakar atas usulan Umar bin Khattab, dan kemudian dituntaskan pada masa Utsman bin Affan. Begitu pula pada masa Umayyah, ide yang muncul adalah pentadwinan Hadis baru dimulai pada masa Umar bin Abdul Aziz (w. 720 M/102 H), khalifah.⁵³ kedelapan Bani Umayyah. di masa Abbasiyah barulah ide tentang qanun lahir. Salah seorang sekretaris negara, Ibnu Muqaffa (w. 756 H/ 140 H), keturunan Persia, mengusulkan gagasan kepada khalifah al-Mansyur (khalifah kedua Abbasiyah) untuk meninjau kembali doktrin yang beraneka ragam, kemudian mengkodifikasikan dan mengundang-undangkan keputusannya sendiri dengan tujuan menciptakan keseragaman yang mengikat para qadhi.

Undang-undang ini juga harus direvisi oleh para khalifah pengganti. Ibnu Muqaffa mengungkapkan bahwa khalifah memiliki hak untuk memutuskan kebijakannya. Khalifah dapat membuat aturan atau tatanan yang mengikat kekuasaan militer dan sipil, dan secara umum pada semua masalah yang tidak ada contoh sebelumnya, tetap berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah.⁵⁴ Dalam hal ini Ibnu Muqaffa berkata kepada al-Mansyur, “Yang amat penting diperhatikan oleh Amirul Mukminin adalah

⁵²Salah satu uraian tentang piagam madinah dapat dilihat dalam Deddy Ismatullah, *Gagasan Pemerintahan Modern dalam Konstitusi Madinah*, (Bandung: Sahifa, 2006), h.54

⁵³ *Ibid*,h.57

⁵⁴Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam* (terj), (Bandung: Nuansa, 2010), h. 95

munculnya hasil keputusan para hakim yang saling bertentangan di berbagai wilayah dinasti Abbasiyah, sekalipun kasusnya yang mereka hadapi adalah sama. Perbedaan hukum yang dijatuhkan tersebut amat membahayakan jiwa, harta dan kehormatan manusia. Dalam menghadapi persoalan ini, seyogyanya khalifah mengambil sikap dengan menghimpun berbagai pendapat fikih yang terkuat dan relevan sebagai hukum materil yang akan diterapkan oleh seluruh pengadilan. Himpunan hukum yang telah disatukan ini dijadikan pedoman dan berkekuatan mengikat bagi seluruh hakim di pengadilan. Untuk itu khalifah perlu menunjuk petugas khusus untuk setiap wilayah yang akan menghimpun hukum yang lebih sesuai dengan kondisi dan daerah tersebut serta menerapkan kaidah-kaidah penerapannya”.

Akan tetapi usulan qanun Ibnu Muqaffa ini belum terealisasi, bahkan karena suatu peristiwa ia dituduh berkhianat dan dihukum oleh khalifah.⁵⁵ Dalam suatu kesempatan ibadah haji, Khalifah al-Mansyur menemui dan meminta Imam Malik (w. 795 M/ 179 H) untuk menyusun sebuah buku yang meliputi persoalan fikih dengan memilih hukum-hukum dari sumber aslinya, dan dengan mempertimbangkan prinsip kemudahan dalam pelaksanaannya. Ketika al-Masyur bertemu dengan Imam Malik, ia berkata “Susunlah sebuah buku fikih dengan menghindari berbagai kesulitan seperti yang dijumpai dalam berbagai pendapat Abdullah bin Umar dan juga tidak seringan yang terdapat dalam hasil ijtihad Abdullah bin Abbas. Tetapi pilihlah pendapat yang sederhana, menengah, serta yang disepakati para

⁵⁵ Ibid., hal. 616.

sahabat, sehingga buku ini dapat dijadikan pegangan diseluruh negeri; kita akan menetapkan bahwa keputusan para hakim tidak boleh berbeda dengan materi hukum yang ada dalam buku tersebut”. Akan tetapi Imam Malik tidak sependapat dengan khalifah, karena menurutnya masing-masing wilayah telah mempunyai aliran tersendiri, seperti penduduk irak yang tidak mungkin sependapat dengan pendapat Malik.

Meskipun beliau tidak sependapat, beliau akhirnya menyusun kitab yang diberi nama Al-Muwaththa'.⁵⁶ Perkembangan qanun berikutnya mulai lebih konkrit pada masa Utsmani, yakni pada masa Sultan Sulaiman (1520-1566 M).⁵⁷ dimana ia secara serius memberlakukan qanun atau Qanun Name sebagai hukum resmi. Atas usaha itulah Sultan Sulaiman diberi gelar Sulaiman al-Qanuni. Dalam Qanun Name dikupas secara lengkap tentang gaji tentara, polisi rakyat yang bukan muslim, urusan kepolisian dan hukum pidana, hukum pertanahan dan hukum perang.

Pada masa Utsmani juga disusun hukum yang mengatur hukum kontrak yang dikenal dengan nama Majalah al-Adliyah.⁵⁸ Pada masa kekuasaan Dinasti Moghul di India juga dihimpun satu aturan hukum yang disebut Fatawa Alamghirriyah. Alamghirriyah adalah nama yang dinisbatkan kepada sultan Aurangzeb (1658-1707 M) dari dinasti Moghul. Ketika Inggris menguasai India (tahun 1772 M), terjadi fusi antara hukum

⁵⁶Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol. 4, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeven, 1996), h. 1094.

⁵⁷Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam*, bag.II, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), h. 492.

⁵⁸Joseph Schacht, op.cit., h.143.

Islam yang telah berjalan di India dengan sistem hukum Inggris sehingga melahirkan istilah Anglo Muhammadan Law (Hukum Inggris Islam).

Dalam praktek, para hakim-hakim Inggris didampingi oleh para mufti untuk menyatakan hukum Islam yang benar untuk membantu para hakim Inggris tersebut.⁵⁹ Indonesia sejak abad ke-15 masehi telah banyak berdiri kesultanan Islam dan menjadikan hukum Islam sebagai aturan negara, meskipun sulit untuk menelusuri bentuk konkrit peraturan yang diterapkannya. Ketika Indonesia menjadi wilayah Belanda, sistem hukum Belanda banyak mewarnai sistem hukum yang diterapkan di Indonesia sampai kini. di Indonesia semangat qanun telah ada sejak awal pendirian bangsa Indonesia yang ditandai dari ide untuk memasukkan kewajiban melaksanakan syariat bagi pemeluk agama Islam. di era orde baru, sebagian dari hukum Islam diakomodasi oleh pemerintah dengan lahirnya undang-undang perkawinan (1974),²⁰ Peraturan pemerintah tentang Wakaf (1977),²¹ Undang-undang peradilan agama (1987), Kompilasi hukum Islam (1991). di era reformasi, semangat Qanun al-Ahkam semakin besar baik melalui undang-undang maupun melalui peraturan daerah, dan hasilnya beberapa undang-undang maupun peraturan daerah berkenaan dengan hukum Islam telah lahir.

7. Ragam Pandangan Ulama tentang Taqin al-Ahkam

Meskipun ulama klasik belum mengenal istilah qanun karena ia merupakan suatu istilah baru. Akan tetapi, gejala serupa telah ada sejak

⁵⁹ *Ibid.*, h. 145-148

lama. Alasannya, para hakim berkewajiban mengikuti sesuatu pendapat ketika memutuskan suatu perkara, yang tidak boleh dilanggarnya, sekalipun memiliki ijtihad sendiri. Suatu hukum yang diundang-undangkan akan mewajibkan para hakim untuk memegang ketetapan di dalamnya karena telah menjadi hukum syar'i yang positif dan tidak boleh dilanggar meski mereka memiliki ijtihad sendiri atas masalah yang diatur dalam perundang-undangan itu. Hal ini mengakibatkan para ulama terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang membolehkan dan kelompok yang melarang.⁶⁰

- a. Kelompok yang Membolehkan Menurut Abu Hanifah, penguasa boleh mewajibkan para hakim untuk memutuskan suatu masalah menggunakan mazhab tertentu. Pendapat ini tidak disetujui oleh kedua muridnya, Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan. Abu Hanifah berargumentasi bahwa wewenang untuk mengadili dibatasi oleh tempat, waktu, dan diberikan kepada orang tertentu pula. Jika penguasa mengangkat seseorang sebagai hakim maka jabatan itu dibatasi pada waktu dan tempat tertentu.

Hal ini karena orang tersebut adalah bertugas sebagai wakil penguasa. Jika penguasa melarang hakim untuk memutuskan perkara berdasarkan berbagai mazhab yang ada maka hakim pun tidak boleh melakukannya. Ia hanya boleh memutuskan berdasarkan kitab undang-undang yang telah disahkan penguasa. Mayoritas para ulama besar

⁶⁰ Hartono Mardjono, *Menegakkan Syari'at Islam dalam Konteks Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1997), hal. 125.

kontemporer memperbolehkan Qanun al-Ahkam. di antara mereka adalah Shalih bin Ghashun, Abdul Majid bin Hasan, Abdullah bin Mani`, Abdullah Khayyath, Muhammad bin Jabir, Rasyid bin Hunain, dan Rasyid bin Khunain. Selain mereka adalah Musthafa al-Zarqa, Muhammad Abu Zahrah, Ali al-Khafif, Yusuf al-Qardhawi, Wahbah al-Zuhaili, dan lain-lain.⁶¹

Wajib bagi rakyat untuk menaatinya. Sikap patuh penegak hukum yang melaksanakan undang-undang di mana mereka diwajibkan untuk taat adalah suatu bentuk kepatuhan kepada pemerintah sebagaimana yang diperintahkan oleh ayat tersebut. Usman bin Affan pernah memerintahkan untuk membakar mushafmushaf yang lain selain mushaf resmi yang telah dikodifikasi pada masa pemerintahannya. Hal itu dilakukan demi kemaslahatan umat dan menjaga agar Al-Qur'an mempunyai satu mushaf Al-Qur'an yang resmi sehingga tidak menimbulkan perpecahan di kalangan umat. Kebijakannya ini akhirnya diakui sebagai suatu kebijakan yang benar. Tidak semua para hakim memiliki pengetahuan yang luas dan dalam, Sehingga mereka pun tidak Mampu melakukan ijtihad dan tidak bisa menetapkan mana pendapat yang paling valid di antara banyak pendapat di berbagai mazhab.

Bahkan terkadang dalam satu mazhab pun, banyak pendapat yang saling berbeda satu sama lain. di samping itu, jika pemerintah tidak menetapkan mana pendapat paling valid yang dijadikan sebagai

⁶¹ Muhammad Amin Ibnu Umar, Hasyiah Ibnu Abidin, Juz 1, (Beirut: Dar alKutub, 1987), h. 163.

undangundang sehingga menjamin kepastian hukum, maka hal itu bisa menimbulkan perbedaan putusan antara satu pengadilan dengan pengadilan lain, atau antara satu hakim dengan hakim yang lain. Hal ini tentu saja akan menimbulkan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat. Suatu pendapat hukum yang ditetapkan sebagai undang-undang harus dihasilkan dengan pemikiran yang mendalam dan pembahasan yang luas.

Undang-undang itu juga ditetapkan harus dengan memperhatikan maqashid syari`ah demi kemaslahatan umat. Dengan demikian, jika undang-undang itu tidak ditaati, maka berarti menyia-nyiakan usaha keras para ulama yang telah menghasilkannya.

- b. Kelompok yang Tidak Membolehkan Pandangan ini merupakan pandangan mayoritas ulama klasik, baik dari kalangan Maliki, Syafi'i, dan Hambali, Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan yang keduanya adalah murid Abu Hanifah. Ibnu Qudamah juga berpendapat bahwa pandangan itu sudah tidak diperselisihkan lagi. Ibnu Taimiyah juga berpendapat sama. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa para hakim harus menghukumi sesuatu bersumber dari apa yang datang dari Allah Swt. Menurutnya, para hakim tidak boleh menghukumi sesuatu bila tidak bersumber langsung pada Allah dan Rasul-Nya. Belakangan, para ulama yang menolak qanun dan menolak kewajiban untuk menaatinya terdiri dari sebagian para ulama besar kontemporer dari Arab Saudi. Di antara mereka adalah Syaikh Bakr bin Abdullah Abu Zaid, Syaikh

Shalih bin Fauzan al-Fauzan, Syaikh Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, Syaikh Abdullah bin Abdurrahman al-Jabirin, Abdurrahman bin Abdullah al-Ajlan, Syaikh Abdullah ibn Muhammad al-Ghunaiman, Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah ar-Rajhi, dan lain-lain.⁶²

8. Pendapat Ulama tentang Qanun al-Ahkam

Kedua pendapat para ulama tentang hukum qanun, yaitu pendapat yang membolehkan dan pendapat yang tidak membolehkan, memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Seperti alasan yang dikemukakan para ulama Arab Saudi yang menolak Qanun al-Ahkam kelihatan bahwa mereka memang cenderung dipengaruhi oleh prinsip Wahabi yang sangat menekankan untuk ittiba` pada tuntunan Rasulullah saw. Upaya Qanun al-Ahkam dianggap sebagai sesuatu yang baru dan tidak dicontohkan oleh Rasulullah Saw. dan oleh salaf as-shalih. Di sisi lain, pelanggaran prinsip tauhid yang diyakini Sebagian ulama Arab Saudi dalam melihat Qanun al-Ahkam dan kewajiban orang untuk mengikutinya sepertinya terlalu berlebihan.

Kewajiban seseorang untuk menaati undang-undang yang telah disahkan penguasa dianggap sesuatu sikap yang lebih mengutamakan hasil pemikiran manusia biasa yang tidak ma`shum.⁶³ Padahal hukum yang dikodifikasikan dan kemudian diundang-undangkan itu tidak bermaksud untuk menggeser kedudukan syari`at yang berbasiskan Alquran dan Hadis.

⁶² Bakar bin Abdullah Abu Zaid, *Fiqh al-Nawazil*, Juz 1 (Muassasah al-Risalah, 1412 H), hal. 1.

⁶³ Zakaria Syafe'i, *Ijtihad Mazhab Hukum Islam tentang Riddah dan Sanksi Hukumnya serta Prospek Impelementasinya di Indonesia*, (Disertasi: 2010), h. 297.

Sehingga kepatuhan terhadap undang-undang yang disarikan dari ijtihad ulama tidak bisa dikategorikan sebagai penggeser ketauhidan seorang hakim.

Selama penguasa memerintah sesuatu (yang dimanifestasikan dalam hukum tertulis/undang-undang) yang tidak menyalahi Alquran dan Hadis, maka rakyat wajib mengikutinya. Oleh karena itu, suatu hukum fiqh yang diundang-undangkan harus benar-benar dikaji secara komprehensif dan melibatkan banyak ulama sehingga “kebenaran dan keadilan” dapat ditemukan melalui konsensus. Teori otoritas hukum menurut Khallaf adalah bahwa khalifah itu memegang tiga kekuasaan. Khalifah berhak membuat undang-undang, melaksanakan undang-undang dan dapat bertindak sebagai hakim (qadhi). Dalam pelaksanaannya, wewenang-wewenang tersebut dapat dilimpahkan.

Kewenangan legislatif ditangani oleh para mujtahid dan mufti. Kewenangan yudikatif dilaksanakan oleh para hakim, dan kewenangan eksekutif ditangani oleh para sultan dan perangkat pemerintah di bawahnya. Konstitusi Kerajaan Saudi Arabia menyatakan bahwa kerajaan berdasarkan Islam dan berpedoman kepada syari'ah Islam dan mazhab yang dipilih menjadi mazhab Negara adalah Hanbali. Pada satu sisi, ada kebenaran alasan ulama yang tidak setuju dengan Qanun al-Ahkam yaitu agar tidak mempersempit pilihan masyarakat dalam berijtihad atau memilih diantara banyak pendapat atas hukum dan syarat suatu perbuatan.

Namun hemat penulis, upaya menyatukan pandangan masyarakat dalam sebuah undang-undang tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang mempersulit masyarakat dan merusak prinsip pluralisme. Adanya kepastian hukum merupakan sesuatu yang dituntut di era modern ini. Pemerintah berkewajiban menetapkan aturan, sedangkan di sisi lain rakyat wajib menaatinya. di Indonesia sendiri, wacana qanun telah ada sejak awal pendirian bangsa Indonesia yang ditandai dari ide untuk memasukkan kewajiban melaksanakan syariat bagi pemeluk agama Islam. Ide ini tidak mendapat respon positif dan kemudian berubah pola pasca runtuhnya Orde Baru seiring dengan ditetapkannya kebijakan otonomi di berbagai daerah.⁶⁴

9. Legislasi Hukum Islam dalam Hukum Nasional

adalah negara hukum (*rechtstaat*), bukan negara kekuasaan (*machstaats*) sebagaimana tertuang dalam bunyi UUD 1945 pasal 1 ayat (3) bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. sebagai negara hukum, maka menjadi suatu kewajiban bahwa setiap penyelenggaraan negara dan pemerintahannya selalu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Maka negara hukum yang dimaksud di sini bukan hanya merupakan pengertian umum yang dapat dikaitkan dengan berbagai konotasi. Maupun hanya *rechtstaat* dan *rule of law* sebagaimana dipraktikkan di barat.

Tapi juga nomokrasi Islam dan negara hukum Pancasila yang dipraktikkan di Indonesia Namun, Indonesia juga bukan negara yang menganut paham teokrasi berdasarkan penyelenggaraan negaranya pada

⁶⁴ M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia, Sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, (Jakarta: Paramadina, 1995), hal. 17.

agama tertentu saja. Di mana, menurut paham teokrasi, negara dan agama dipahami sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Yakni dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan. Sehingga tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara dilakukan dengan titah Tuhan dalam kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, paham ini melahirkan konsep negara agama atau agama resmi, dan dijadikannya agama resmi tersebut sebagai hukum positif. Konsep negara teokrasi ini sama dengan paradigma integralistik.

Yaitu paham yang beranggapan bahwa agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pada tataran lain, negara Indonesia juga tidak menganut negara sekuler yang mendisparitas agama atas negara dan memisahkan secara diametral antara agama dengan negara.

Paham ini melahirkan konsep agama dan negara yang merupakan dua entitas berbeda, dan satu sama lain memiliki wilayah garapan masing-masing. Sehingga, keberadaannya harus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan intervensi. Namun relasi antara agama dan negara di Indonesia dikemas secara sinergis, bukan dikotomis yang memisahkan antara keduanya. Agama dan negara merupakan entitas yang berbeda. Namun, keduanya dipahami saling membutuhkan secara timbal balik.

Yakni agama membutuhkan negara sebagai instrumen dalam melestarikan dan mengembangkan agama. Sebaliknya negara juga membutuhkan agama. Sebab, agama pun membantu negara dalam pembinaan moral, etika, dan spiritualitas. Pemahaman seperti ini disebut dengan paradigma. Maka dalam konteks ke-Indonesia-an paradigma simbiotik ini,

kedudukan hukum Islam menempati posisi strategis sebagai sumber legitimasi untuk menegakkannya dalam porsi yang proporsional.⁶⁵ agama tertentu. Tetapi memberi tempat kepada agama-agama yang dianut oleh rakyat untuk menjadi sumber hukum atau memberi bahan hukum terhadap produk hukum nasional.

Hukum agama sebagai sumber hukum di sini diartikan sebagai sumber hukum materiil (sumber bahan hukum) dan bukan harus menjadi sumber hukum formal (dalam bentuk tertentu) menurut peraturan perundang-undangan. Dalam konteks inilah, Islam sebagai agama yang dipeluk mayoritas penduduk Indonesia memiliki prospek dalam pembangunan hukum nasional. Karena secara kultural, yuridis, filosofis maupun sosiologis, memiliki argumentasi yang sangat kuat. Penerapan atau positivisme hukum Islam dalam sistem hukum nasional setidaknya melalui dua langkah. Yaitu proses demokrasi dan prolegnas (akademisi), bukan indoktrinasi.

Dalam proses demokrasi ada musyawarah mufakat yang kemudian dituangkan dalam prolegnas (progam legislasi nasional). Menurut Jazuni satu-satunya pintu masuk bagi melegalisasikan hukum Islam adalah demokrasi. Produk legislasi ini, dalam batas-batas tertentu, tidak hanya mendapatkan legitimasi dari Islam, tetapi juga menjadi bagian dari hukum Islam.⁶⁶

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menyebutkan bahwa islam bukan Agama resmi negara tetapi hukum islam hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Hukum islam merupakan

⁶⁵ Hasyim Muzadi, *Nahdatul Ulama di Tengah Agenda Persoalan Bangsa*, cet. 1, (Jakarta: logos wacana ilmu, 1999), h. 59.

⁶⁶ Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), h. 15

hukum material yang menjadi sumber pembentuk hukum di Indonesia, di samping sumber-sumber lainnya seperti hukum adat dan hukum barat. Perkembangan hukum Islam dalam konteks hukum nasional, melepaskan diri dari pengaruh teori *receptie* khususnya dalam rangkaian usaha pengembangan pengadilan agama. Oleh karena itu, didalam system hukum di Indonesia ini merupakan bentuk terdekat dengan kodifikasi hukum yang menjadi arah pembangunan hukum nasional di Indonesia.⁶⁷

Eksistensi hukum Islam di Indonesia dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat di lihat dari cara mengintegrasikan norma agama ke dalam system hukum nasional Indonesia saat ini dan masa yang akan datang menggunakan model system hukum *anglo saxon* karena hukum itu akan di perlukan pada tempat, orang dan kasusu tertentu. Mencermati perspektif hukum Islam dalam system hukum nasional guna melaksanakan pembangunan hukum sekurang-kurangnya masuk dalam tiga bentuk.⁶⁸ Pertama, hukum Islam tampil dalam bentuk hukum positif yang hanya berlaku bagi umat Islam. Dalam hal ini hukum Islam berperan mengisi kekosongan hukum dalam hukum positif. Kedua, hukum Islam berkontribusi bagi penyusunan hukum nasional sebagai sumber nilai. Ketiga, hukum Islam bertujuan untuk rahmatan lil alamin. Bentuk kedua dan ketiga lebih cocok untuk diterapkan karna dalam bentuk ini hukum Islam mudah terlaksana.⁶⁹

⁶⁷ Bustanul Arifin, *Dimensi Hukum islam Dalam Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Isnani Press, 1999) h 101.

⁶⁸ Rr. Rina Antasari, *Istinbath/No.16/Th.XIV/Juni/2015/89-108*, h. 1

⁶⁹ Eksistensi Hukum Islam Dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia (On-line), tersedia di <https://www.researchgate.net/>

B. Tinjauan Pustaka

Untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti serta sebagai landasan teoritis dalam penyusunan dan penelitian ini. Landasan ini perlu ditegaskan agar suatu penelitian mempunyai dasar yang kuat. Maka penulis menggunakan referensi atau tinjauan pustaka yang ada relevansinya dengan judul skripsi yang penulis buat.

Sebelum diterapkan peraturan Menteri KKP no 12 Tahun 2020 Tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan yaitu diberlakukannya menteri No 56 Tahun 2016 Dan sebelumnya juga peraturan menteri KKP No 1 Tahun 2015.

Dalam skripsi Harlylyarti “Dampak Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No 1 Tahun 2015 Terhadap Pendapatan Nelayan Kepiting Di Kelurahan Nelayan Indah Kecamatan Medan Labuhan” yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi Permen KP No. 1/2015 membawa dampak negatif terhadap nelayan tangkap kepiting dilihat dari berkurangnya pendapatan nelayan.⁷⁰

Dalam jurnal Z. F. Amiek Soemarmi, Untung Dwi Hananto, "Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus Spp*),

[publication/330146226_eksistensi_hukum_Islam_dalam_peraturan_perundang-undangan_di_Indonesia#references](#) (26 Oktober 2020).

⁷⁰ Skripsi harlylyarti , Dampak Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No 1 Tahun 2015 Terhadap Pendapatan Nelayan Kepiting Di Kelurahan Nelayan Indah Kecamatan Medan Labuhan

Kepiting (*Scylla Spp*), Dan Rajungan (*Portunus Pelagicus Spp*) Sebagai Upaya Pelestarian Sumber Daya Hayati Laut," *Diponegoro Law Journal*, vol. 5, no. 2, pp. 1-15, Mar. 2016. Tujuan penulisan hukum ini untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan serta untuk mengetahui permasalahan yang timbul dengan berlakunya Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp*) dan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Kesimpulan dari penelitian hukum ini ialah Pelaksanaan Peraturan Menteri tersebut diatas telah berlaku dan sudah terlaksana dari tanggal 6 Januari 2015 di wilayah Indonesia. Tetapi masih ditemui adanya kendala dalam pelaksanaannya, kendalanya adalah para nelayan merasa dirugikan, karena nelayan merasa penghasilannya berkurang. Oleh karena itu Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu mengkaji, mensosialisasi, dan memberikan mata pencaharian alternatif yang baik untuk nelayan agar terciptanya peningkatan kesejahteraan melalui pelaksanaan isi Peraturan Menteri dengan benar.⁷¹

Selanjutnya dalam jurnal ALBACORE ISSN 2549-1326 Volume I, No 3, Oktober 2017 "Tingkat Pemahaman Nelayan Terkait Dengan Kebijakan Pelarangan Penangkapan Benih Lobster *Panulirus Spp*. Di Palabuhanratu" oleh Furqan, Tri Wiji Nurani, Dkk. Dalam penelitian mereka, Lobster memiliki nilai ekonomis dan permintaan tinggi, baik untuk konsumsi maupun benih lobster (puerulus/ BL) untuk budidaya. Pemerintah membatasi ukuran penangkapan

⁷¹ *Diponegoro Law Journal*, vol. 5, no. 2, pp. 1-15, Mar. 2016

lobster *Panulirus* spp. dengan mengeluarkan PERMENKP No.1/2015 jo PERMENKP No.56/2016. Praktik penangkapan dan penyelundupan benih lobster di Palabuhanratu masih terjadi. Tujuan penelitian ini: 1)Menganalisis isi kebijakan PERMENKP No.1/2015, dan PERMENKP No.56/2016; 2)Mengukur tingkat pemahaman dan persepsi nelayan terhadap keberlanjutan sumberdaya lobster, dan sikap nelayan terhadap kebijakan. Penelitian ini dilakukan pada Bulan Juli-Agustus 2017 di Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi. Data sekunder (dokumen kebijakan terkait perikanan lobster) dianalisis dengan content analysis, dan data primer (observasi, kuesioner dan wawancara) dianalisis dengan sequential explanatory design mengacu pada Creswell (2009). Analisis kebijakan menunjukkan ketentuan ukuran layak tangkap dalam kebijakan PERMENKP No.1/2015 jo PERMENKP No.56/2016 tidak melihat kondisi biologis dari masing-masing spesies. Kendala terkait implementasi kebijakan di wilayah Perairan Teluk Palabuhanratu yaitu kurangnya sosialisasi, dan sumberdaya kebijakan. Tingkat pengetahuan nelayan terhadap kebijakan sudah cukup, namun nelayan merasa bahwa penangkapan BL tidak mengganggu keberlanjutan lobster, sehingga nelayan menolak kebijakan tersebut. Sebaiknya kebijakan pemerintah mempertimbangkan kondisi di lapangan dengan informasi yang mendukung untuk keberlanjutan sumberdaya ikan, agar tepat sasaran dan memberi manfaat sosial ekonomi masa kini dan masa depan.⁷²

⁷² ALBACORE ISSN 2549-1326 Volume I, No 3, Oktober 2017

Perbedaan penelitian ini dengan karya tulis yang penulis paparkan adalah bahwa penulis menganalisis isi kebijakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan. Dengan objek penelitian Lobster dengan menggunakan metode kualitatif yang masuk dalam kategori penelitian kepustakaan yang menggunakan sumber data primer dan sekunder



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah Bin Abu Zaid Bakar, *Fiqh al-Nawazil*, Juz 1 Muassasah al-Risalah, 1412 .
- al-Mawardi, Ali bin Muhammad. *al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah, 2006), 4: Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- aL-Zarqa, Mushtafa Al-Madkhâl al-Fiqh al-`Am, Juz II, Beirut: Dar al-Qalam, 1418.
- Amin Ibnu Umar , Muhammad, Hasyiah Ibnu Abidin, Juz 1, Beirut: Dar alKutub, 1987.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Fakultas Teknologi UGM, 1986.
- Anis ,Ibrahim, *Al-Mu`jam al-Wasîth*, Juz II, Beirut: Dar al-Ilmiyah, 1987.
- Anwar,M. Syafi'i Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia, Sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Arikanto, Suharsimi.*Prosedur Penelitian cetakan ke-3*. Bandung: Bina Aksara, 1990.
- Arikanto, Suharsimi.*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Reneka Cipta, 2013.
- Arikanto, Suharsimi.*Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta Revisi, 1996.
- Aziz Dahlan ,Abdul dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol. 4, akarta: Ichtiar Baru van Hoeven, 1996.
- Barda nawawi arief, *masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*, prenada media group, Jakarta, 2010
- Bambang sutiyoso, *reformasi keadilan dan penegak hukum di Indonesia*, UII Press, yougyakarta, 2010

Bambang sutiyoso, *reformasi keadilan dan penegak hukum di Indonesia*, UII Press, yougyakarta, 2010

Barda nawawi arief, *masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*, prenada media group, Jakarta, 2010

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hikmah Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010).

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Adi Grafika Semarang, 1994.

Departement Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Dinas Perikanan (On-Line) Tersedia di <https://www.pertanianku.com/kerap-diselundupkan-ini-benih-lobster-yang-banyak-dicari/> (27 November 2019).

Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Metode Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.

Hukum Penyelundupan Barang” (On-Line), tersedia di: <https://pengusahamuslim.com/2360-hukum-menyelundupkan-barang.html> (22 November 2019).

Husin, Al-Munawar Said Agil. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. (Jakarta: PT. Penamadani, 2005).

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta:

_____). *Fiqh Siyasah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017).

Karim Zaidan, Abdul, Al-Madkhal li al-Darasah al-Syari'ah al-Islamiyah, Beirut: Resalah Publisher, 1969.

M. Lapidus ,Ira, *Sejarah Sosial Ummat Islam*, bag.II, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Mahmasani, Sobhi, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: al-Ma'arif, 1976.

Mardjono, Hartono, *Menegakkan Syari'at Islam dalam Konteks Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 1997.

- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Mubarak ,Jaih, *Hukum Islam*, Bandung: Benang Merah Press, 2006.
- Muhammad, Abdul Kadir.*Hukum dan Penelitian Hukum*.Bandung: Citra Aditia Bakti, 2004.
- Musbikin, Imam.*Qawa'id al-Fiqhiyyah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Muzadi Hasyim, Nahdatul Ulama di Tengah Agenda Persoalan Bangsa, cet. 1, Jakarta: logos wacana ilmu, 1999.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020.
- Peraturan Mentri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/Permen-Kp/2016.
- Prenamedia Group, 2014.
- Pusat bahasa departemen pendidikan nasional, *kamus umum bahasa Indonesia edisi ketiga*, balai pustaka, Jakarta, 2007, hlm.426 sampai 1226
- Rangawidjaja , Rosjidi, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1998.
- Salah satu uraian tentang piagam madinah dapat dilihat dalam Deddy Ismatullah, *Gagasan Pemerintahan Modern dalam Konstitusi Madinah*, Bandung: Sahifa, 2006.
- Schacht, Joseph, *Pengantar Hukum Islam* (terj), Bandung: Nuansa, 2010.
- Setiawan, Ebta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2016.
- Soer jono soekanto, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, rajawali pers, Jakarta, 2014
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.

Syafe'i, Zakaria *Ijtihad Mazhab Hukum Islam tentang Riddah dan Sanksi Hukumnya serta Prospek Impelementasinya di Indonesia*, Disertasi: 2010.

Tika, Muhammad Pabundu. *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
Titi triwulan tutik, *pengantar ilmu hukum prestasi pustakanya*, Jakarta, 2006

Usman, Husaini. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008.

Utrecht, E, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtiar, 1957.

van Kan, J. dan J.H. Beekhuis, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Pustaka Sarjana, t.t 1976.

Zahra, Muhammad Abu. *Usul Fiqh*.

On-Line

Alat Tangkap Aktif, Pasif, dan Statis” (On-line), tersedia di <https://www.slideshare.net/mobile/nautika/diskusi-2-penangkapan> (26 Oktober 2020)

Beda Kebijakan Menteri Edhy dan Susi, dari Lobster hingga Kapal Maling, (On-line), tersedia di <https://katadata.co.id/pingitaria/berita/5e9a4c48f2ad3/beda-kebijakan-menteri-edhy-dan-susi-dari-lobster-hingga-kapal-maling>, (26 Oktober 2020).

Eksistensi Hukum Islam Dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia (On-line), tersedia di https://www.researchgate.net/publication/330146226_eksistensi_hukum_islam_dalam_peraturan_perundang-undangan_di_indonesia#references (26 Oktober 2020)

Hilangnya Aspek Lingkungan Dalam Tata Kelola Pemanfaatan Lobster (On-line), tersedia di <https://www.mongabay.co.id/2020/02/14/hilangnya-aspek-lingkungan-dalam-tata-kelola-pemanfaatan-lobster/> (27 Oktober 2020)

<http://rangerwhite09-artikel.blogspot.co.id/2010/04/kajian-fiqh-siyasah-tentangkonsep.html>, (05 Januari 2019).

Perbedaan Kebijakan Menteri KKP Nomor 56 Tahun 2016 dengan KKP Nomor 12 Tahun 2020, (On-line) tersedia <https://money.kompas.com/read/2020/07/06/164619426/menteri-edhy-bandingkan-kebijakannya-dengan-susi-apa-bedanya?page=all>, (25 Oktober 2020).

Rr. Rina Antasari, Istinbath/No.16/Th.XIV/Juni/2015/89-108

Prinsip-prinsip

Siyasah

Dusturiyah

http://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://kilaskalbar.com/opini/26/06/2018/siyasah-dusturiyah-dalam-peraturan-undangan-di-indonesia/amp/&ved=2ahUKEwixs_2WuJHuAhXugtGFHfSLAS0QFjAlegQIBxAB&usg=AOvVAW0OUrXfq1wuvMEoqyuSuS3r&cf=1

